

TUNTUTAN PUBLIK ISLAM DI TINGKAT DOMESTIK PADA MASA PEMERINTAHAN SBY (2004-2009) TERHADAP KEBIJAKAN INDONESIA ATAS KASUS NUKLIR IRAN

Inggried Christhiansend Purnomo Putri¹

Abstract

The existence of reformation era Indonesia has given a public space to participate in the decision making process policy in domestic level. Reformation era is mark by the strength of civil society in Indonesia as the balance and the control towards government powers. Civil society movement in Indonesia can not be separated from Islam because most of Indonesian citizen are moslem. These has make issues related to Islam tendency sensitive to be respond especially in SBY government era (2004-2009) and when the Iranian nuclear issues appear. Indonesian foreign policy on Iranian nuclear case can not be detached from the concern of Islam public in Indonesia and foreign policy basically can not be separated from domestic politic. According to David Easton, politics in domestic level always being influenced by input whether it is support or demand. On that reason government is push to change the policy on Iranian nuclear case, which in the beginning agreed on 1747 resolution and then abstain on 1803 resolution. Since there are a lot of public Islam demand in domestic level, government make concideration regarding Iranian nuclear policy taken from the demand.

Keywords : civil society, foreign policy, Iran, UN resolution

Abstraksi

Keberadaan era reformasi di Indonesia memberikan ruang kepada public untuk berpartisipasi pada proses pengambilan kebijakan pada tingkat domestic. Era reformasi menandai kekuatan civil society di Indonesia sebagai pengimbang dan pengontrol kekuatan negate. Gerakan civil society di Indonesia tidak bias dilepaskan dari Islam karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim. Hal ini membuat isu tentang Islam menjadi sensitive terutama pada pemerintahan SBY (2004-2009) dan ketika isu nuklir Iran muncul. Kebijakan luar negeri Indonesia atas kasus nuklir Iran tidak bias dilepaskan dari perhatian public Islam di Indonesia dan kebijakan luar negeri tidak bias dilepaskan dari politik domestic. Menurut David Easton, politik pada tingkat domestic selalu berpengaruh pada input baik berupa tuntutan maupun dukungan. Pada alas an itulah pemerintah mengubah kebijakan terkait dengan isu nuklir Iran yang pada awalnya menyetujui resolusi PBB no 1747 menjadi abstain pada resolusi 1803. Sejak saat itu, tuntutan masyarakat Islam di tingkat domestic menjadi perhatian pemerintah.

Kata kunci : civil society, kebijakan luar negeri, Iran, resolusi PBB

¹ Staf Pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang

Pendahuluan

Hubungan diplomatik antara Indonesia-Iran telah dibuka sejak tahun 1950 pada tingkat kedutaan. Hubungan Bilateral RI-Iran dalam bidang politik juga sangat berkembang pesat dan bahkan sejak Mei 2003 di Teheran telah ditandatangani *MoU* mengenai pembentukan Komite Konsultasi Bilateral di Bidang Politik sebagai bukti kedekatan bilateral diantara kedua belah pihak. Selama ini pemerintah Iran selalu mendukung sikap maupun kebijakan pemerintah Indonesia dan begitu juga sebaliknya, tetapi sejak mencuatnya program nuklir Iran di Era presiden Ahmadinejad hubungan bilateral antara Indonesia-Iran menjadi agak renggang.²

Hal tersebut bermula ketika IAEA pada tanggal 24 September 2005 menyatakan Iran telah gagal mematuhi kewajibannya terhadap kesepakatan penjagaan (*Safeguard Agreements*) bagian dari NPT (*Non Proliferation Treaty*), sehingga muncul ketidakpercayaan atas program nuklir Iran untuk tujuan damai yang kemudian menjadi perhatian Dewan Keamanan PBB. DK PBB sebagai sebuah badan yang memiliki tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, memberikan reaksi berupa resolusi-resolusi atas kasus nuklir Iran ini. Resolusi-resolusi yang pernah dikeluarkan oleh DK PBB untuk menyelesaikan kasus Nuklir Iran terdiri dari Resolusi 1679, Resolusi 1737, Resolusi 1747, Resolusi 1803, Resolusi 1810 dan resolusi 1835.³ . Enam resolusi DK PBB tersebut memiliki inti yang sama agar Iran menghentikan pengembangan teknologi nuklir demi mematuhi prinsip internasional untuk tidak melakukan pengembangan nuklir (*Non Proliferation*).

Di tahun 2006 DK PBB mengeluarkan resolusi 1747 dimana Indonesia yang pada saat itu terpilih sebagai salah satu anggota tidak tetap DK PBB, memberikan suara setuju atas resolusi 1747 tersebut. Sikap pemerintah Indonesia yang menyetujui Resolusi 1747 secara otomatis menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan di tingkat domestik dikarenakan sikap Indonesia yang pada awalnya mendukung pengembangan nuklir Iran kemudian berubah memojokkan posisi Iran melalui Resolusi 1747 selain itu tidak adanya sosialisasi dari pemerintah sebelumnya atas kasus nuklir Iran tersebut.

Teori Sistem Politik

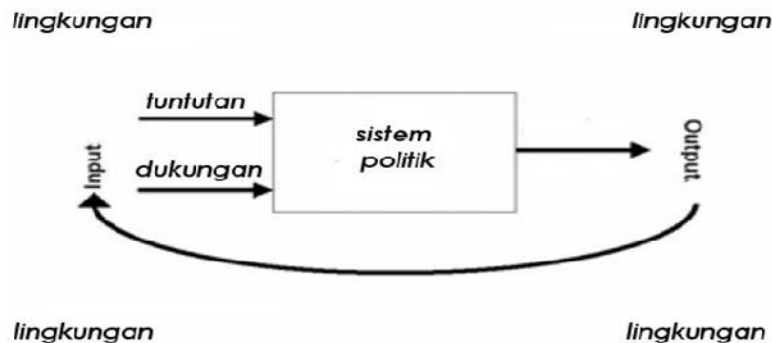
Untuk mampu menjelaskan tentang dinamika politik yang penuh dengan tuntutan dan dukungan di tingkat domestik atas kasus nuklir Iran maka penulis menggunakan *The political system theory* milik David Easton⁴ yang merupakan bagian dari sistem sosial yang menjalankan alokasi nilai-nilai dalam bentuk kebijaksanaan-kebijaksanaan atau keputusan-keputusan, yang alokasinya bersifat otoritatif (dikuatkan oleh kekuasaan yang sah dan alokasi yang otoritatif tersebut mengikat seluruh masyarakat. Teori ini dapat membantu untuk menjelaskan mengapa tuntutan dan dukungan publik atas kasus nuklir Iran mampu mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kasus nuklir Iran itu sendiri. Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik awal berlangsungnya suatu proses politik yang akhirnya mampu membentuk dinamika politik itu sendiri.

² KBRI Tehran, "Sekilas Hubungan Bilateral Indonesia-Iran", agustus, 2008 dari <www.indonesian-embassy.ir/english/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=139> diakses tanggal 20 January 2010

³ keterangan ini diperoleh dari S/RES/1769 (2006) :Non Proliferation, S/RES/1737 (2006) :Non Proliferation, S/RES/1747 (2007) :Non Proliferation, S/RES/1803 (2008) :Non Proliferation, S/RES/1810 (2008) :Non Proliferation of Weapon Of Mass Destruction, S/RES/1835 (2008) :Non Proliferation, <http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions.html> diakses tanggal 21 January 2010

⁴ Ulasan tentang teori sistem politik milik David Easton ini diambil dari buku: David Easton (alih bahasa: Drs. Sahat Simamora) "*Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*" Jakarta: P.T. Bina Aksara, P.T. Anggota IKAPI : 1984

Skema Kerja Sistem Politik menurut David Easton



Quelle: Easton, David (1965). *A Systems Analysis of Political Life*, New York u.a., S. 32.

Konsep Foreign Policy

Konsep *foreign policy* yang pernah dikemukakan oleh Henry Kissinger "*foreign policy begins when domestic policy ends*"⁵ Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa politik luar negeri berada pada intersection antara aspek dalam negeri suatu Negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu Negara, maka politik luar negeri sulit dipisahkan dengan politik domestik.

Konsep politik luar negeri ini mampu membantu untuk menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia terhadap kasus nuklir Iran merupakan suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri Indonesia yang dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dalam mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimiliki oleh Indonesia.⁶

Model Politik Birokratik

Model Politik Birokratik merupakan salah satu model dari tiga model teori pembuatan keputusan karya Graham T. Allison. Indonesia adalah contoh dari sistem politik dimana birokrasi merupakan gelanggang pertama bagi kegiatan politik, terutama sesudah masa orde baru birokrasi muncul sebagai satu-satunya lembaga yang bisa melakukan tindakan politik yang mandiri.⁷

Di dalam model ini, perilaku politik luar negeri bukanlah perilaku aktor yang monolit, yaitu aktor yang memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya dan melakukan tindakan untuk mencapainya. Perilaku itu adalah hasil dari "permainan politik" dalam membuat keputusan dan dalam menerapkan keputusan itu. Karena seringkali yang terjadi

⁵ Wolfram F. Hanrieder. 1971. *Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays*. New York: David Mc Kay Co., hal.22

⁶ James N. Rosenau, 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, hal. 171-173

⁷ Mohtar Mas' oed, *Indonesian Economy and Political Structure during the early new order, 1966-1971* (Ann Arbor, Michigan : University Microfilm International, 1983) dalam buku Mohtar Mas' oed and Colin Mac Andrews, "*Perbandingan Sistem Politik*" Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2006. Hal.265

nampak tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya dikejar oleh pemerintah. Ada proses bargaining games sebagai penentu perilaku politik luar negeri, dimana setiap aktor memiliki tujuan yang berbeda-beda di dalamnya.

Konsep *Civil Society*

Penggunaan konsep *civil society* menjelaskan tentang peranan *non state actor* di tingkat domestik dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kasus nuklir Iran. Selain itu konsep *civil society* mampu menjelaskan bahwa masyarakat sipil tidak secara *a priori* subordinatif terhadap Negara, tetapi lebih dari itu ia bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang menghadapi intervensi Negara dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan sendiri tetapi juga terhadap kepentingan publik.⁸

Hal diatas sesuai dengan pernyataan Ernest Gellner "*Civil societies are often populated by organizations such as registered charities, development non-governmental organizations, community groups, women's organizations, faith-based organizations, professional associations, trade unions, self-help groups, social movement, business associations, coalitions and advocacy group.*"⁹

Konsep ini menekankan bahwa dengan bekerja sama satu dengan yang lainnya, organisasi-organisasi non-pemerintah dan jenis kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya dapat menciptakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penetapan agenda kebijakan, penyusunan, dan advokasi dalam politik demokratisasi.¹⁰

Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Atas Kasus Nuklir Iran

Posisi Nuklir Iran Di Mata Dunia Internasional

Dalam peta perpolitikan global permasalahan tentang energy nuklir telah menjadi perhatian yang serius khususnya pasca perang dunia ke-2 semenjak AS menjadi pemenang setelah meluluhlantahkan Jepang dengan bom atomnya pada 6 dan 9 Agustus 1945. Kejadian sesudahnya merupakan perkembangan terkini dari isu pengembangan senjata nuklir atau dari konflik perlombaan senjata nuklir oleh dua kubu yaitu barat yang diwakili oleh AS dan kubu timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet.¹¹ Yang akhirnya berkesudahan dengan runtuhnya Uni Soviet dari pentas internasional.

Pasca perang dingin isu tentang teknologi nuklir ini juga selalu menjadi agenda hangat berbagai perbincangan di forum-forum internasional karena keberadaannya bisa menghancurkan dunia. Di era sekarang ini keberadaan Negara-negara yang memiliki teknologi nuklir terpusat pada Negara-negara besar saja. Diantara Negara-negara dunia ke-3 mungkin Iran termasuk beruntung karena memiliki teknologi nuklir yang mumpuni.

Isu nuklir Iran kemudian menjadi dilemma yaitu sebagai hak (*right*) sebuah Negara di region timur tengah yang menjadi perdebatan serius berkaitan tentang kelanjutan perdamaian dunia. Adanya ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat internasional khususnya AS dan sekutunya menyatakan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh Iran

⁸ Ahmad Fathan Aniq, "*Menimbang civil society dan masyarakat madani, antara mitos dan realitas*" dimuat di *Majalah AFKAR PCI NU Mesir Edisi XLVI Bulan Juni 2008*

⁹ Ernest Gellner, "*The Importance of Being Modular*", dalam John A. Hall, ed, 1995. *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Polity. Hal.42

¹⁰ Amy Risley.2004."Citizen Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan: Comparative Perspective on Civil Society Jaringan dan Koalisi" diakses di <<http://www.allacademic.com/meta/p61097-index.html>> diakses tanggal 7 Maret 2010

¹¹ Budi Hari Wibowo, "*Terorisme, makhluk apa (?) : Potret Kegagalan Tata Dunia Baru*", diakses di <<http://www.dephan.go.id/modules.php?name=section&op=viewarticle&artid=36>> diakses tanggal 25 Juli 2010

untuk memproduksi senjata nuklir sehingga memaksa Negara-negara di dunia termasuk AS dan DK PBB menjadikan isu nuklir Iran sebagai agenda yang sangat penting.

Nuklir Iran menjadi isu global dan perbincangan hangat diawal decade tahun 2000-an. Proses pengembangan teknologi yang mulanya mendapat restu dari masyarakat internasional mulai diusik dengan isu dapat mengancam peradaban dan nilai-nilai perdamaian dunia. Walaupun pihak Teheran sendiri sudah berkali-kali mengatakan bahwa proyek pengembangan nuklirnya adalah murni tujuan untuk damai, memasok energy bagi keperluan industry dan listrik dalam negeri.¹²

Situasi ini semakin rumit karena Iran tidak mau bekerjasama lagi dengan IAEA, karena Iran merasa bahwa IAEA berpotensi membawa isu nuklir menjadi agenda untuk membawa permasalahan nuklir Iran ke DK PBB. Maka parlemen Iran mengeluarkan kebijakan untuk tidak mengizinkan IAEA melakukan inspeksi ataupun pemeriksaan di Iran. kebijakan tersebut disetujui mayoritas hampir dari seluruh anggota Parlemen Iran, dimana dari 197 suara 183 diantaranya mendukung pemberlakuan kebijakan tersebut.

Kebijakan Dewan Keamanan PBB Atas Kasus Nuklir Iran

Pada tanggal 25 Februari 2005, Presiden Amerika Serikat, George W. Bush memberikan pernyataan bahwa baik Amerika maupun Eropa keduanya telah sepakat program pengayaan uranium Iran haruslah sesegera mungkin dihentikan. Menanggapi hal tersebut, Iran menyatakan bahwa mereka mempunyai hak untuk menggunakan energy nuklir untuk tujuan damai.

Namun, pada akhirnya IAEA memutuskan untuk menyerahkan krisis nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB. Dua puluh tujuh Negara, memberikan suaranya terhadap resolusi yang pada intinya menyatakan untuk menyerahkan isu Iran kepada Dewan Keamanan PBB. Tiga Negara yaitu Kuba, Syria, dan Venezuela memberikan suara untuk menolak resolusi tersebut. Sedangkan Indonesia, Algeria, Belarus, Libya dan South Africa memberikan suara abstain. Setelah keluarnya keputusan tersebut, Iran tetap bertahan pada pendiriannya dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berkompromi terhadap program pengayaan uraniumnya dengan Amerika ataupun Negara-negara barat lainnya.

Dalam menanggapi isu Iran yang tidak kunjung usai DK PBB melalui otoritasnya sebagai penjaga perdamaian dunia memberikan resolusi kepada Iran terkait dengan program pengayaan uranium untuk keperluan nuklirnya. Walaupun Iran berdalih untuk tujuan damai namun DK PBB selama rentang waktu 2006-2008 telah mengeluarkan 4 resolusi kepada Iran.

Tabel 1. Resolusi PBB terkait Isu Nuklir Iran

NO	Resolusi	Tahun	Substansi
1	1696	2006	Penghentian aktivitas pengembangan nuklir dan sanksi atau embargo ekonomi
2	1737	2006	Pelarangan izin bepergian bagi warga Iran tidak membantu program nuklir Iran pembatasan bagi orang-orang yang berusaha memperoleh alat, bahan-bahan dan teknologi yang dilarang. ¹³
3	1747	2007	Memperpanjang pembekuan asset perusahaan dan individu yang mendukung aktivitas nuklir sensitive

¹² M.Hamdan Basyar, "Sanksi Baru Untuk Nuklir Iran", diakses di <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional> diakses tanggal 25 July 2010

¹³ "Posisi Indonesia Tidak Berubah Dalam Masalah Nuklir Iran", diakses di <http://www.id.indonesia.nl/content/view/124/144/> diakses tanggal 25 July 2010

			<p>Memerintahkan Negara-negara memberi tahu panel PBB jika pejabat Iran yang terlibat dalam aktivitas nuklir sensitive memasuki teritori mereka</p> <p>Menerapkan embargo pada senjata-senjata konvensional yang bisa diekspor Iran.</p> <p>Meminta Negara dan institusi internasional tidak melakukan komitmen baru bantuan financial kepada Iran kecuali untuk tujuan kemanusiaan.¹⁴</p>
1803	2008		Iran harus menghentikan kegiatan pengayaan uraniumnya serta riset-riset tentang Uranium.

Kebijakan Indonesia Atas Kasus Nuklir Iran di DK PBB

Sebagai bagian atau elemen dalam majelis DK PBB peran aktif Indonesia juga diperlihatkan tatkala mengatasi persoalan krisis nuklir Iran yang memang sejak tahun 2006 menjadi agenda pembahasan di DK PBB. Selama tiga tahun berturut-turut 2006-2008 isu nuklir Iran selalu menjadi perbincangan hangat karena dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap tatanan ketertiban dunia. Maka dalam hal ini DK PBB merasa perlu mengambil sikap tegas terhadap Iran. Konsekuensinya Iran harus dijatuhi sanksi berupa resolusi-resolusi yang bertujuan agar Iran bisa menghentikan kegiatan nuklirnya.

Selama dekade satu tahun tersebut (2007-2008), Indonesia turut terlibat dalam kapasitasnya sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk merancang resolusi bagi Iran. Terkait dengan resolusi 1747 Indonesia mengambil pilihan (opsi) setuju dan mendukung sepenuhnya ide tersebut. PBB mengeluarkan resolusi 1747 mengenai nuklir Iran yang didukung secara aklamasi oleh 15 negara anggota DK PBB, termasuk Indonesia. Sebelumnya DK PBB telah mengeluarkan resolusi 1737 yang memberikan sanksi terbatas terhadap Iran, tetapi pada waktu itu Indonesia belum menjadi anggota DK PBB.

Berkaitan dengan sikap Indonesia yang mendukung resolusi 1747 Menlu Hasan Wirajuda mengatakan bahwa Indonesia mendukung resolusi tersebut dikarenakan resolusi 1747 lebih mendorong terwujudnya solusi damai bagi Iran yang memang sudah lama diupayakan oleh Indonesia. Pihak Indonesia dan Iran selalu melakukan konsultasi sepanjang berlakunya resolusi tersebut di New York. Posisi Indonesia bukan berarti tidak menunjukkan solidaritas terhadap Negara-negara Arab ataupun Negara berkembang lainnya. Hasan menambahkan contoh sikap yang diambil oleh Qatar (Negara Arab) ataupun Afrika Selatan (Mantan Ketua GNB) yang mengambil opsi sama yaitu menyetujui draft resolusi 1747 tersebut.¹⁵

Tetapi kemudian kebijakan Indonesia berubah pada saat dikeluarkannya Resolusi DK PBB no 1803. Indonesia dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh DK PBB menyatakan bersikap abstain dan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang tidak mendukung atau bersikap abstain atas resolusi 1803 sedangkan 14 negara lainnya menyatakan mendukung resolusi itu. Resolusi 1803 merupakan resolusi ketiga yang diberikan kepada Iran atas kasus nuklirnya.

Resolusi 1803 berisikan tentang penambahan sanksi dari resolusi-resolusi sebelumnya yaitu resolusi 1696 dan resolusi 1737. Isinya secara detail yaitu berupa penambahan larangan bepergian dan pembekuan aset-aset para pejabat Iran yang terkait dengan program pengembangan nuklir serta menerapkan larangan bepergian terhadap mereka yang terlibat banyak dalam aktivitas pengembangan nuklir Iran. Untuk pertama

¹⁴ "Resolusi 1747" diakses di <<http://www.temppointeraktif.com>> diakses tanggal 25 July 2010

¹⁵ "Menlu Jelaskan Alasan Dukungan RI Soal Resolusi 1747", diakses di <<http://www.gatra.com/2007-03-28/artikel.php?id=103352>> diakses tanggal 25 July 2010

kalinya, larangan untuk melakukan perdagangan dengan Iran juga akan diterapkan terhadap produk-produk untuk penggunaan militer maupun sipil.¹⁶

Sanksi juga akan mencakup pemberlakuan pengawasan keuangan terhadap dua bank yang dicurigai terlibat dalam kegiatan pengembangan nuklir, sementara semua negara diminta untuk berhati-hati memberikan kredit, jaminan ataupun asuransi kepada Iran. Selain itu, inspeksi juga akan dilakukan terhadap kapal-kapal yang dicurigai membawa barang-barang terlarang, baik dari maupun ke Iran.

Peran Publik Islam di Indonesia Dalam Pengambilan Kebijakan Luar Negeri

Era Reformasi dan Posisi Islam di Indonesia

Reformasi di Indonesia adalah sebuah *working progress* menuju suatu Negara demokrasi. *Working progress* ini mengindikasikan bahwa reformasi adalah sebuah proses politik. Didalamnya terdapat berbagai upaya-upaya dan aktivitas-aktivitas untuk mengenalkan norma-norma dan prinsip-prinsip demokrasi, membentuk dan mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi, serta menata tingkah laku politik demokratis.¹⁷

Pasca tumbanganya kekuasaan Soeharto atau berakhirnya masa Orde Baru di Indonesia, persoalan transisi demokrasi kemudian menjadi permasalahan mendesak bagi gerakan pro perubahan, sebuah gerakan yang menginginkan terciptanya masyarakat yang madani. Era reformasi ini dimaknai sebagai penguatan kapasitas ekonomi-politik rakyat yang mensyaratkan adanya kebebasan dalam mengekspresikan hak-hak sosial, ekonomi dan politik.

Era reformasi di Indonesia telah terjadi perubahan pemerintahan yang biasanya terklasifikasi otoriterian menuju sistem pemerintahan yang partisipatif. Dalam hal ini demokrasi merupakan suatu konsep mengenai perubahan kekuasaan politik yang melibatkan sejumlah kepentingan yang berpartisipasi pada kebebasan individu dan kelompok, yang terbagi menjadi aktor-aktor dalam perebutan kekuasaan. Adapun aktor kondusif pada demokratisasi, adalah negara (*state*) dan *civil society* (masyarakat). Lalu ditingkat realitas politik, peran masyarakat sebagai *civil society* mejadi keharusan yang utama untuk diperkuat sebagai pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat dan merupakan prasyarat bagi demokratisasi.

Munculnya kesadaran akan pentingnya *civil society* berhubungan dengan keinginan untuk mewujudkan suatu ruang di mana terwujud kesamaan setiap orang di depan hukum dan memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat sehingga Negara akan berusaha menarik *civil society* menjadi bagian dari ruang kekuasaan politik dan mampu mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.¹⁸ Berkaitan dengan era reformasi yang telah terjadi, juga berdampak terhadap kebebasan pers di Indonesia. Suatu pencerahan datang kepada kebebasan pers, setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Pada saat itu rakyat menginginkan adanya reformasi pada segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya yang pada masa Orde Baru terbelenggu. Tumbuhnya pers pada masa reformasi merupakan hal yang menguntungkan bagi masyarakat. Kehadiran pers saat

¹⁶ Indonesian Radio "Indonesia Abstain Dalam Voting, Iran Sampaikan Penghargaan", 4 Maret 2008, diakses di

<http://www.indonesian.irib.ir/index.php?option=com_content&view=section&id=16&Itemid=65>

Diakses tanggal 21 Maret 2010

¹⁷ "Term of Reference, Refleksi Satu Dekade Reformasi Indonesia", diakses di <<http://dies.unud.ac.id/wp.../term-of-reference-dies-natalis-unud-revisi-deplu.pdf>> diakses tanggal 09 Mei 2010

¹⁸ Ignas Kleden, *Center for East Indonesia Affairs*, "Indonesia Setelah 5 Tahun Reformasi", diakses di <<http://www.freedom-institute.org/id/index.php?page=profil&detail-artikel&detail=dir&id=101>> diakses tanggal 21 Mei 2010

ini dianggap sudah mampu mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah antara penguasa dan rakyat.¹⁹

Posisi Islam di Era Reformasi

Era reformasi telah menciptakan era keterbukaan dan kebebasan terhadap public di Indonesia. Hal tersebut tidak disia-siakan oleh publik Islam untuk ikut serta dalam proses terciptanya demokratisasi di Indonesia. Berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru menandai bangkitnya demokrasi dan kebebasan umat Islam dalam partisipasi politik dalam negeri. Presiden Indonesia ke tiga yaitu Presiden Habibie telah memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam berpolitik dan menghapuskan system tiga partai dengan system multi partai. Selama kurun waktu pemerintahan Presiden Habibie, Indonesia memiliki kurang lebih 181 partai²⁰, masa pemerintahan ini disebut sebagai masa transisi demokrasi dan hal tersebut berlangsung sampe sekarang.

Pada era reformasi ini, gerak dan langkah kelompok Islam tidak lagi ditekan dan dibatasi. Keberhasilan Indonesia menjadi Negara yang demokratis tidak bisa dilepaskan dari andil dan partisipasi penuh umat Islam. Selain memberikan suara dalam pemilu, umat Islam pun ikut berpartisipasi dalam politik secara aktif melalui saluran-saluran politik yang ada atau berkreasi mendirikan partai politik baru berbasis agamis atau nasionalis.

Peran Partai Islam Di Indonesia

Pada era reformasi para elite politik berlomba-lomba mendirikan partai politik. Partai politik yang didirikan ada yang berdasar agama, golongan, faham, dan bahkan ada yang berdasarkan suku seperti Partai Reformasi Tionghoa dan berdasarkan gender seperti Partai Perempuan Indonesia.

Yang menarik dari berdirinya partai-partai politik tersebut adalah berdirinya partai politik berdasarkan agama yaitu khususnya Islam. Hal ini karena selama ini seperti disinyalir oleh para pengamat bahwa Islam sebagai kekuatan politik sudah habis ketika PPP menerima Pancasila sebagai asasnya.²¹ Munculnya partai-partai politik Islam di era reformasi ini merupakan suatu fenomena yang menarik, sekaligus menjawab bahwa kekuatan politik Islam belum habis dan halaman awal Islam politik kembali telah dibuka.

Meskipun demikian, jika melihat indicator utama yang digunakan sebagai dasar penilaian itu adalah munculnya sejumlah partai yang menggunakan symbol Islam dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa yang dimaksud adalah munculnya kembali kekuatan politik Islam.²² Sudah sewajarnya kemunculan partai Islam itu dianggap sebagai repolitisasi Islam, karena sudah 32 tahun partai Islam mengalami kekangan Orde Baru, kembalinya kekuatan politik Islam ini mewarani percaturan politik Indonesia pasca Orde Baru dan prospek politik Islam kembali. Dengan Kemunculan kembali partai Islam dapat dijadikan sebagai indikator munculnya kembalinya politik Islam.

Pada pemilu tahun 1999, pemilu pertama setelah runtuhnya otoritarianisme Orde Baru pada 1998, jumlah suara dari partai Islam tersebut adalah 36,68 persen suara. Pada pemilu 1999, partai Islam mendapatkan 168 kursi dari jumlah kursi 458 di DPR. Lima tahun kemudian, pada pemilu tahun 2004, partai Islam secara keseluruhan memperoleh suara sebesar 42,36 persen. Partai Islam pada pemilu tersebut mendapatkan kursi sebanyak 233

¹⁹ Eduard Depri, "Media Massa Dan Partisipasi Politik" diakses di <<http://www.kbri-canberra.org.au/brief/2009/07/010709-12.htm>> diakses tanggal 5 April 2010

²⁰ Abdul Halim, "Perjuangan Umat Islam Melalui Politik Di Indonesia", hal.34 diakses di <http://myais.fsktm.um.edu.my/7533/1/31/-47_prof_Halim.pdf> diakses tanggal 26 April 2010

²¹ Taufik Abdulah, "Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia", Jakarta: LP3ES, 1987, hal.2

²² *Ibid*

dari 550 jumlah kursi di DPR, sehingga perolehan kursi partai Islam di DPR mengalami peningkatan yang cukup signifikan.²³

Posisi partai Islam yang signifikan tersebut dapat memaksimalkan perannya di DPR sebagai wakil dari umat Islam, yaitu pertama sebagai representation, mengartikulasikan keprihatinan, tuntutan, harapan dan melindungi kepentingan rakyat terutama umat Islam ketika kebijakan dibuat. Kedua sebagai advokasi, anggregasi aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering kali alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut.

Ketiga sebagai administrative oversight, yaitu menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif atau pemerintah. Berdasarkan fungsi ini, DPR tidak dibenarkan apabila bersikap lepas tangan terhadap kebijakan pemerintah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Seperti halnya kebijakan luar negeri pemerintah terhadap masalah kasus nuklir Iran yang dipersoalkan oleh masyarakat sehingga partai Islam yang memiliki suara signifikan di DPR dapat memanggil pemerintah atau badan eksekutif untuk meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban pemerintah itu sendiri.²⁴

Peran Ormas-ormas Islam Di Indonesia

Ormas Islam di Indonesia mulai menggeliat sejak runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Hal tersebut dikarenakan adanya kebebasan berpendapat sehingga menimbulkan gerakan *civil society* semakin meningkat di Indonesia. Keberadaan Islam kemudian berubah setelah munculnya era reformasi di Indonesia. Keberadaan *civil society* di Indonesia begitu dibutuhkan pada masa transisi menuju demokrasi seperti sekarang ini.

Organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Mathlaul Anwar, serta beberapa organisasi sayapnya, termasuk juga kelompok masyarakat sipil dari golongan lain, memiliki peran yang signifikan dalam mengawal laju demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks Muhammadiyah, organisasi sayap seperti Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) dapat berkontribusi melebarkan sayap dakwah Muhammadiyah dan mengartikulasikan gagasan kritis semisal mengangkat isu mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemberantasan korupsi dan pemantauan pemilu.²⁵

Peran Tokoh-Tokoh Islam atau Ulama Di Indonesia

Tidak dapat disangkal bahwa ulama atau tokoh-tokoh Islam telah memainkan peran sangat penting di dalam masyarakat Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan sampai zaman pembangunan sekarang ini. Peran ulama yang begitu penting ini disebabkan oleh ulama merupakan panutan yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Di beberapa bagian daerah di Indonesia masih sering mendengar bahwa masyarakat lebih suka mendengar sikap dan arahan para ulama

²³ Testriono, “Partai Islam Dan Pemilih Yang Semakin Rasional” diakses di <<http://www.ppim.or.id/main/partai-islam-dan-pemilih-yng-makin-rasional/detail.php?artikel=2009316205420>> diakses tanggal 5 April 2010

²⁴ H.A. Kartiwa “Implementasi Peran dan Fungsi DPR dalam Rangka Mewujudkan “good governance”, diakses di <http://www.pustaka.unpad.ac.id/wp.../05/implementasi_peran_fungsi_dprd.pdf> diakses tanggal 10 Mei 2010

²⁵ Pujangga, “Ketika NU-Muhammadiyah Bersatu”, edisi 29 Juni 2009, diakses di <<http://m.politikana.com/baca/2009/06/29/ketika-nu-muhammadiyah-bersatu>> diakses tanggal 5 April 2010

sebelum melakukan sesuatu, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ulama di Indonesia sangat tinggi.²⁶

Ulama memiliki peranan sebagai pemasok nilai-nilai Islam kepada semua orsospol untuk dibawa ke lembaga penentu keputusan politik formal. Namun, meletakkan ulama secara lepas sama sekali dari orsospol juga tidak realistis. Semua orsospol yang menyadari bahwa umat Islam adalah mayoritas yang sangat potensial untuk memberi dukungan menginginkan adanya ulama di orsospol masing-masing. Dalam keadaan seperti inilah ulama ataupun tokoh-tokoh muslim memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan umat dan dalam rangka alokasi nilai-nilai moral dan agamis dalam kehidupan politik, sehingga nilai-nilai Islam masuk melalui semua orsospol lewat ulama-ulama yang dijadikan penasehat disana.²⁷

Adapun tokoh-tokoh Islam atau Ulama yang memiliki peranan cukup penting dalam masyarakat Indonesia adalah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi, Ketua Majelis Harian Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Dr. Abdul Asri dan tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Amien Rais, Din Syamsudin dan Syafii Ma'arif.²⁸ Mereka merupakan tokoh-tokoh Islam di Indonesia yang selalu menyerukan suara umat Islam dan memberi kritikan-kritikan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dianggap telah merugikan atau mendzolimi kepentingan umat di dalamnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ulama atau tokoh pemimpin Islam dapat menjadi kelompok penekan yang selalu diperhitungkan oleh pemerintah karena mereka memiliki basis massa yang cukup banyak serta bersifat independent sehingga terkadang mereka dianggap mewakili suara umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, tokoh-tokoh pemimpin Islam dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan sensitivitas agama atau kepentingan umat Islam.

Pengaruh Antara Tuntutan Publik Islam Di Tingkat Domestik Terhadap Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Atas Kasus Nuklir Iran

Dinamika politik di Indonesia berubah cukup drastis sejak reformasi dan berimplikasi pula pada kebijakan politik luar negeri Indonesia itu sendiri. Fenomena tuntutan publik Islam atas resolusi DK PBB 1747 membuka kesadaran bahwa setiap kebijakan politik luar negeri akan diketahui, direspon, dan bahkan dikritik oleh public.

Kecaman Tokoh-tokoh Pemimpin Islam

Pemimpin ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu pemimpin NU dan Muhammadiyah secara kompak mengecam sikap pemerintah Indonesia. KH Hasyim Muzadi (NU) dan Prof Dr. Din Syamsuddin (Muhammadiyah), dengan tegas mengecam sikap Pemerintah SBY - JK yang tidak hanya melukai bangsa Iran, melainkan juga mengabaikan suara hati nurani umat Islam di dalam maupun luar negeri.

Demonstrasi Ormas-ormas Islam

Pada akhirnya publik Indonesia tidak secara bulat mendukung keputusan Indonesia untuk menyetujui resolusi tersebut. Indikator negatifnya dukungan publik terhadap

²⁶ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *"Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia"*, Yogyakarta: Gama Media, 1999. Hal.245

²⁷ Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, *"Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia"*, Yogyakarta: Gama Media, 1999. Hal.257-258

²⁸ Surya (Current Article), *"SBY Terancam di-Impeach Gara-Gara Dukung Sanksi PBB Terhadap Iran"*, diakses di <<http://www1.surya.co.id/v2>> edisi 20 Maret 2007, data diakses tanggal 14 Oktober 2009.

resolusi 1747 dapat dilihat secara informal melalui protes masyarakat atas langkah pemerintah yang terwakili melalui pernyataan tokoh masyarakat dan survei media massa. Dan secara formal politik melalui hak interpelasi DPR.

Interpelasi DPR Terhadap Pemerintah

Banyaknya tuntutan yang timbul dari berbagai ormas-ormas Islam di Indonesia dan juga kecaman dari berbagai tokoh-tokoh pemimpin Islam pada akhirnya juga mampu mengusik partai-partai Islam yang menjadi wakil di DPR. Partai-partai Islam di DPR yang merasa sebagai wakil dari suara umat Islam di Indonesia berinisiatif mengajukan hak interpelasi untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah terkait dengan kebijakannya yang telah memberi dukungan atas resolusi DK PBB no 1747 tersebut. Hampir semua fraksi DPR mendukung hak interpelasi yaitu berjumlah 7 fraksi, kecuali FD (Fraksi Demokrat) dan FDS (Fraksi Damai Sejahtera) yang menolak dan FBR (Fraksi Bintang Reformasi) yang abstain, dengan total jumlah dukungan sekitar 300 suara.²⁹

Hal diatas juga didukung oleh Fraksi PAN yang juga merupakan salah satu fraksi pengusul interpelasi, yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah atas resolusi 1747 telah memperkuat ketimpangan global yang dimotori Amerika Serikat (AS) dan interpelasi DPR tersebut merupakan usaha untuk menjadi kekuatan penyeimbang bagi dominasi kekuatan global terhadap Indonesia.³⁰ DPR menggunakan hak interpelasinya agar rakyat juga mengetahui tentang kejelasan alasan pemerintah mendukung resolusi 1747 tersebut. Hak interpelasi merupakan hak dasar rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, untuk mengontrol jalannya pemerintahan sebagaimana hak lain seperti angket, menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Hal demikian juga telah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang (UU) No.22/2003 Pasal 27 tentang susunan dan ketentuan MPR,DPR,DPD, dan DPRD sebagai aturan derivasi konstitusi diterangkan bahwa hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 171 Tatib DPR juga dikatakan demikian. Dalam Pasal 174 ayat (1) hingga (4) Tatib DPR menyatakan bahwa, apabila usul interpelasi disetujui, pimpinan DPR menyampaikannya kepada presiden dan mengundang presiden untuk memberikan keterangan. Terhadap keterangan presiden itu diberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, presiden memberikan jawabannya.³¹

Hak interpelasi DPR atas nuklir Iran ini merupakan interpelasi yang pertama kali dalam sejarah Indonesia yang dapat berjalan dengan mulus. Partai-partai Islam sebagai pengusul hak interpelasi DPR ternyata mampu menyerukan suara ataupun aspirasi umat Islam di Indonesia.

Situasi Politik Domestik Antara Legislatif dan Eksekutif

Sekiranya baru kali ini prinsip diplomasi dan politik luar negeri pemerintah mendapat arus protes secara lebih luas dan serius dari berbagai lapisan bangsa yang terdiri dari lembaga negara, parpol, organisasi massa, termasuk media. Yaitu, mengenai sikap pemerintah Indonesia bersama negara-negara anggota tetap memperlakukan Iran di DK-PBB.

²⁹ "Hak Interpelasi Soal Iran Diterima", BBC edisi 17 Mei 2007, diakses di <http://www.bbc.co.uk/indonesian/forum/.../070517_dprian.shtml> diakses tanggal 20 Mei 2010

³⁰ *Ibid*

³¹ Sofian Arsyad Siregar, "Menjaga NKRI dengan Syari'ah", diakses di <http://anh110774.multiply.com/journal/item/32/menjaga_NKRI_dengan_syariah> diakses tanggal 24 Mei 2010

Pada dasarnya hak interpelasi DPR ini tidak bisa dikesampingkan. Meskipun hanya merupakan hak untuk bertanya, perlu diingat kembali jatuhnya mantan presiden Abdurrahman Wahid dimulai dari interpelasi pada Juni tahun 2000. Selain itu interpelasi atas kasus nuklir Iran ini berkaitan erat dengan sensitivitas Islam sehingga mendapat dukungan dari organisasi sosial dan massa umat Islam di Indonesia. Kekompakan antara elit-elit politik dan DPR dengan cendekiawan muslim dan sebagian masyarakatnya tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pemerintah.

Perubahan Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Resolusi DK PBB No.1803

Indonesia mengambil langkah yang cukup berani dengan menjadi satu-satunya Negara yang bersikap abstain dalam resolusi 1803 yaitu resolusi yang memberi sanksi tambahan terhadap Iran. Adanya perubahan sikap atau kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap kasus nuklir Iran tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan konteks domestik yang masih belum stabil dan perbaikan citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat muslim pada khususnya dan Negara Iran itu sendiri yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia.

Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Resolusi 1803 adalah :

- *Pertama*, Kondisi domestik di Indonesia pasca pemerintah menyetujui resolusi 1747 membuat citra pemerintah menjadi buruk di mata umat muslim di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyaknya tuntutan dan kecaman dari berbagai kalangan atas sikap pemerintah, yang dianggap tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyatnya yang mayoritas beragama Islam.
- *Kedua*, Sikap abstain yang diambil oleh pemerintah dalam resolusi 1803 dilakukan untuk menjaga stabilnya sistem politik dalam negeri. Banyaknya tuntutan dari ormas-ormas Islam membuat stabilitas nasional sedikit terganggu. Pemerintah cenderung takut jika ormas-ormas Islam bersikap anarkis dan melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Pemerintah sadar, semakin ormas Islam ditekan maka mereka akan semakin memberontak terhadap pemerintah.
- *Ketiga*, adanya interpelasi DPR yang meminta pertanggungjawaban pemerintah membuat posisi pemerintah semakin terpojok. Apalagi pengusulan hak interpelasi tersebut berjalan mulus dan mendapat dukungan dari seluruh khalayak Islam termasuk ormas dan tokoh-tokoh pemimpin Islam di Indonesia. Ditambah adanya isu impeachment terhadap presiden membuat legitimasi presiden sebagai badan eksekutif merasa sedikit tidak aman.
- *Keempat*, pemerintahan SBY ingin memperbaiki citranya di mata public Islam. SBY yang pada waktu itu menjelang masa akhir jabatannya pada periode 2004-2009, tidak mau memberi kesan yang buruk terhadap masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Islam. Adanya ancaman dari ormas-ormas dan tokoh-tokoh pemimpin Islam di Indonesia yang tidak akan memberi dukungan terhadap pencalonan SBY sebagai pilpres pada periode berikutnya, membuat pemerintahan SBY harus mempertimbangkan masak-masak kebijakannya terhadap kasus nuklir Iran.

Hal tersebut dikarenakan pada periode pertama pemerintahan Presiden Yudhoyono, ormas Islam dan tokoh pemimpin Islam terutama NU dan Muhammadiyah masih memegang kendali umat Islam di Indonesia. Kemenangan Presiden SBY pada pemilihan presiden tahun 2004 yang disokong juga oleh beberapa koalisi partai Islam, basisnya juga

merupakan salah satu dari organisasi tersebut yaitu Muhammadiyah, terutama PKS dan PAN.³²

Dalam perkembangannya, public Islam pada akhirnya menjadi salah satu aspek yang mampu mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah baik kebijakan domestik maupun kebijakan politik luar negeri terutama yang berkaitan dengan sensitivitas Islam, seperti halnya kasus nuklir Iran ini.

Jika dilihat dari penjelasan di atas maka perubahan kebijakan pemerintah terhadap kasus nuklir Iran, yang pada awalnya setuju atas Resolusi 1747 lalu kemudian berubah menjadi abstain atas Resolusi 1803 sejalan dengan teori sistem politik David Easton. Adanya tuntutan dalam masyarakat yang masuk ke dalam sistem politik akan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam kasus nuklir Iran ini, masyarakat lebih cenderung menyerukan tuntutan-tuntutan terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia atas resolusi 1747, dimana pemerintah memberi suara setuju atas penambahan sanksi terhadap Iran.

Tuntutan-tuntutan tersebut sangat wajar, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam dan hal yang berkaitan dengan Iran sangat dekat dengan Islam. Tuntutan-tuntutan yang diwakilkan oleh ormas-ormas maupun tokoh-tokoh pemimpin Islam pada akhirnya mampu mendesak lembaga legislative untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Sekiranya suara umat muslim yang diwakilkan oleh orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan mampu memberi pengaruh untuk mempertimbangkan kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia atas kasus nuklir Iran. Dari adanya tuntutan dan aspirasi dari public Islam tersebut pemerintah sebagai pemerintahan yang demokratis dituntut untuk menyerapnya dan dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, termasuk kebijakan terhadap kasus nuklir Iran ini. Hal itu akan dapat dijadikan pemerintah untuk menaikkan legitimasinya baik di dalam domestik maupun di luar negeri terutama Negara-negara Islam khususnya Iran.

KESIMPULAN

Sejak era Reformasi di Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan SBY sistem pada proses pengambilan kebijakan telah mengalami demokratisasi. Ketika kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat maka akan menimbulkan tuntutan maupun gelombang protes di dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang terjadi ketika pemerintah Indonesia mendukung sanksi Iran atas resolusi 1747. Kebijakan politik luar negeri Indonesia atas resolusi 1747 telah menimbulkan kontroversi di tingkat domestik.

Tuntutan public Islam di atas pada akhirnya tidak sia-sia karena saat DK PBB mengeluarkan resolusi 1803, pemerintah mengambil sikap abstain. Jika dilihat dari penjelasan pemerintah, perubahan kebijakan Indonesia atas resolusi 1803 dikarenakan : *Pertama*, Kondisi domestik di Indonesia pasca pemerintah menyetujui resolusi 1747 membuat citra pemerintah menjadi buruk di mata umat muslim di Indonesia. *Kedua*, Sikap abstain yang diambil oleh pemerintah dalam resolusi 1803 dilakukan untuk menjaga stabilnya sistem politik dalam negeri. *Ketiga*, adanya interpelasi DPR yang meminta pertanggungjawaban pemerintah membuat posisi pemerintah semakin terpojok.

³² Yon Machmudi, Ph.D, “PKS Mengancam Eksistensi Ormas Islam?” diakses di <<http://www.staff.ui.ac.id/internal/070603201/publikasi/PKSdiMataOrmasIslam.doc>> dikases tanggal 28 Mei 2010

Daftar Pustaka

- Amstuz, Mark R. 1995. *International Conflict and Cooperation An introduction to World Politics*. America: W.M.C. Brown Communication.inc.
- Allison, G. & P. Zelikow. 1999. *Essence Of Decision Explaining The Cuban Missile Crisis*. second edition, Longman.
- Abdulah, Taufik. 1987. *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dougherty, James, E and PEALTZGraff, L, Robert. 2001. *Contending Theories Of International Relations*. Addison Wesley Longman .Inc. USA.
- Easton, David (alih bahasa: Drs. Sahat Simamora). 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Jakarta: P.T. Bina Aksara, P.T. Anggota IKAPI.
- Effendy, Bachtiar. 2000. *Repolitisi Islam*, Dalam A. Suryana Sudrajat, ed., *Fenomena Partai Islam*. Bandung: Mizan.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta : LP3ES. MD, Moh. Mahfud. 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAndrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nakamura, Mitsuo. 2003. *Islam and Civil Society in Southeast Asia; Azyumardi Azra, Civil Society dan Demokrasi di Indonesia*, dalam Burhanuddin (ed.), Jakarta : INCIS.
- Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press.
- Rosenau, James N. 1980. *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Adhitama
- Suryabrata, Sumadi. 1997, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada
- Smith, Donald Eugene. 1985. *Agama dan Modernisasi Politik: Suatu Kajian Analitis*. Penerjemah Drs. Machnun Husein, Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Tebba, Sudirman. 1989. *Islam Di Indonesia: Dari Minoritas Politik Menuju Mayoritas Budaya*. Jurnal Ilmu Politik, No.4.
- Webber, Mark and Michael Smith, et.al., 2002. *Foreign Policy In A Transformed World*. London: Pearson Education Limited.

INTERNET

- Amy Risley. 2004. "Citizen Partisipasi dalam Pembuatan Kebijakan: Comparative Perspective on Civil Society Jaringan dan Koalisi" diakses di <http://www.allacademic.com/meta/p61097-index.html> diakses tanggal 7 Maret 2010
- Bataviase, "Hubungan Bilateral Indonesia-Iran makin erat" edisi senin, 15 Maret 2010, diakses [http://www.bataviase.co.id/bataviase/search/?search_block_form=Iran=Iran Central Chamber](http://www.bataviase.co.id/bataviase/search/?search_block_form=Iran=Iran%20Central%20Chamber) diakses tanggal 18 Maret 2010
- Embassy of the Islamic Republic of Iran, "Memorandum of Understanding Between the Delegations of the Republic of Indonesia and the Delegations of the Islamic Republic of Iran" diakses di <http://www.deplu.go.id/iran.htm> diakses tanggal 7 April 2010
- Foreign Investment Conference To Be Held In Iran, Islamic Republik News Agency, May 27, 2009, diakses di <http://www.irna.ir/En/View/FullStory/?NewsId=510384&idLanguage=3> diakses tanggal 17 Maret 2010

- Gatra, *"Kerjasama Iran-Ri Jajaki Kerja Sama Nuklir"*, edisi 06 April 2006, diakses di <http://www.gatra.com/2006-04-06/rubrik.php?id=16> > diakses tanggal 06 Mei 2010
- Gunaryadi, Ketua Bidang Kajian Ilmu Sosial Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Belanda, *"Mengapa Indonesia Mendukung Proliferasi Nuklir Iran"*, diakses di <http://www.kmtf.ft.uqm.ac.id/forum/index.php?topic=296.msg2698#msg2698> > diakses tanggal 2 April 2010
- Hermawan , Ary, *"Iran Press Offers To Cooperate With Indonesia"*, Jakarta post, May, 12, 2009, diakses <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/12/iranian-press-offers-cooperate-with-indonesia.html?1> > diakses tanggal 17 Maret 2010
- Paul, *"UNSC Resolution 1747"*, diakses dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?newsID=21997&Cr=Iran&Cr1> > diakses tanggal 20 Maret 2010
- S/RES/1769 (2006) :Non Proliferation, S/RES/1737 (2006) :Non Prolifiration, S/RES/1747 (2007) :Non Prolifiration, S/RES/1803 (2008) :Non Prolifiration, S/RES/1810 (2008) :Non Prolifiration of Weapon Of Mass Destruction, S/RES/1835(2008):Nn Prolifiration, http://www.un.org/docs/sc/unsc_resolutions.html > diakses tanggal 21 January 2010